

**SKRIPSI**



**ANALIS PERAN LEMBAGA MUSYAWARAH  
KELURAHAN (LMK) DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN  
BINTARO KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**Disusun Oleh :**

**Nama : AHMAD RAIHAN**

**NPM : 2112011036**

**JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**JAKARTA, 2024**



**ANALIS PERAN LEMBAGA MUSYAWARAH  
KELURAHAN (LMK) DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN  
BINTARO KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Terapan**

**Oleh :**

**Nama : AHMAD RAIHAN**  
**NPM : 2112011036**  
**JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK**  
**PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA**

**SKRIPSI**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**JAKARTA, 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK  
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN**

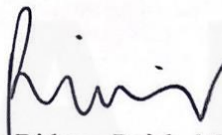
**LEMBAR PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

Nama : Ahmad Raihan  
NPM : 2112011036  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Publik  
Judul : Analisis Peran Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada, 24 Oktober 2024

Pembimbing

  
(Dr. Ridwan Rajab, M.Si.)

## LEMBAR PENGESAHAN

Telah diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2024.

Ketua merangkap Anggota



(Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd.)

Sekretaris merangkap Anggota

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters.

(Risky Yustiani Posumah, S.Sos., M.P.A.)

Anggota

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters.

(Dr. Ridwan Rajab, M.Si.)

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Rahan

NPM : 2112011036

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul “Analisis Peran Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan **hasil plagiat atau penjiplakan** terhadap sebuah karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia **menerima sanksi** berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan

Jakarta, 31 Oktober 2024

Peneliti,

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METER', and 'TEMPEL'. The serial number '9F8AMX042482961' is visible at the bottom.

Ahmad Raihan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya hingga saat ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Peran Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan”.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai bentuk syarat peneliti untuk memperoleh gelar sarjana terapan pada program studi Administrasi Pembangunan Negara (APN) Politeknik STIA LAN Jakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari adanya bantuan terlepas dari bimbingan atau dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih peneliti hanturkan terutama kepada Bapak **Dr. Ridwan Rajab, M.Si.** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, peneliti juga menyadari banyak pihak yang terlibat dalam mendukung peneliti untuk menyusun tugas akhir ini, maka peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

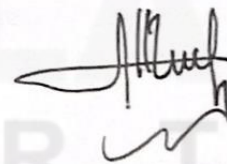
1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA. Selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk menyusun skripsi ini;
2. Ibu Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan motivasi peneliti selama perkuliahan;
3. Bapak/Ibu dosen dan staf Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmu dan bantuan administrasi peneliti selama perkuliahan;
4. Bapak dan Ibu tercinta besar yang telah memberikan kasih sayang, bantuan moral dan moril, serta memotivasi dan juga doa yang senantiasa mengiringi sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini;

5. Lurah, KASI Pemerintahan, Staf Kelurahan Bintaro, dan Pengurus LMK Kelurahan Bintaro yang telah membantu peneliti, baik arahan ataupun informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
6. Chintia Jouliana terkasih yang telah menemani, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan dukungan kepada peneliti selama penyusunan tugas akhir ini;
7. Keluarga besar Masjid Jami Bintaro Jaya terkhusus Yayasan dan Takmir yang telah memberikan dukungan dalam biaya pendidikan peneliti selama perkuliahan sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Kelas Kebijakan Publik 2021 yang senantiasa memberikan dukungan satu sama lain dan kebersamaan satu sama lain sebagai pengalaman dan kesan berharga bagi peneliti;
9. Rekan-rekan MJBH *Homestay* yang telah menjadi *partner* dalam bertugas dan memberikan dukungan penuh kepada peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang terlibat dalam penyusunan tugas akhir ini.

Dengan kerendahan hati, peneliti menyadari masih banyaknya kekurangan dari penulisan skripsi ini. Peneliti menghargai atas kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak, agar nantinya skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 31 Oktober 2024

Peneliti,



Ahmad Raihan

## ABSTRAK

Ahmad Raihan, 2112011036

**“ANALISIS PERAN LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN BINTARO KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN”**

**Skripsi, lxxxviii hlm : 88 halaman**

**Dosen Pembimbing : Dr. Ridwan Rajab, M.Si.**

Rendahnya partisipasi dikalangan tertentu menjadi permasalahan utama dalam terciptanya keberhasilan dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan pada mengetahui bagaimana peran Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kelurahan Bintaro dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Teori yang digunakan yaitu teori partisipasi masyarakat menurut Marschall (2006) yaitu (1) adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat (2) kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses (3) adanya akses masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan dan menggunakan teori tangga partisipasi menurut Arnstein (1969) yaitu (1) Tingkatan Non Partisipasi (2) Tingkatan Tokenism (3) Tingkatan Kekuatan Masyarakat. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dengan 5 (lima) orang *key Informant* yang memang mengetahui secara langsung peran dari LMK itu sendiri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kelurahan Bintaro berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi peran tersebut belum berjalan dengan optimal dan tingkat partisipasi di Kelurahan Bintaro berada pada tahap kedua yaitu tokenism. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan perannya tersebut, peneliti menyarankan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kelurahan Bintaro untuk meningkatkan kreatifitas dalam menyelenggarakan kegiatan, peningkatan kapasitas masyarakat, dan memanfaatkan sosial media secara masif untuk memperluas jangkauan dalam mensosialisasikan kegiatan ataupun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan agar tingkat partisipasi masyarakat terus meningkat kedepannya.

**Kata Kunci** : Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK); Peran; Masyarakat; Partisipasi.



## ABSTRACT

Ahmad Raihan, 2112011036

**“ANALYSIS OF THE ROLE OF THE URBAN VILLAGE DELIBERATION COUNCIL (LMK) INCREASING CITIZEN INVOLVEMENT IN BINTARO VILLAGE PESANGGRAHAN DISTRICT SOUTH JAKARTA ADMINISTRATIVE CITY”**

*Thesis, lxxxviii page : 88 page*

**Supervisor: Dr. Ridwan Rajab, M.Si.**

*Low participation among certain groups has become a major problem in achieving successful development. This study aims to determine the role of the Urban Village Deliberation Council (LMK) of Bintaro Village in increasing community participation. The theories used are Marschall's (2006) theory of community participation, which includes (1) the existence of a forum for accommodating public participation, (2) the community's ability to be involved in the process, and (3) the community's access to express opinions in the decision-making process, and Arnstein's (1969) ladder of citizen participation theory, which consists of (1) non-participation, (2) tokenism, and (3) citizen power. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and document analysis. Structured interviews were conducted with five key informants who have direct knowledge of the LMK's role.*

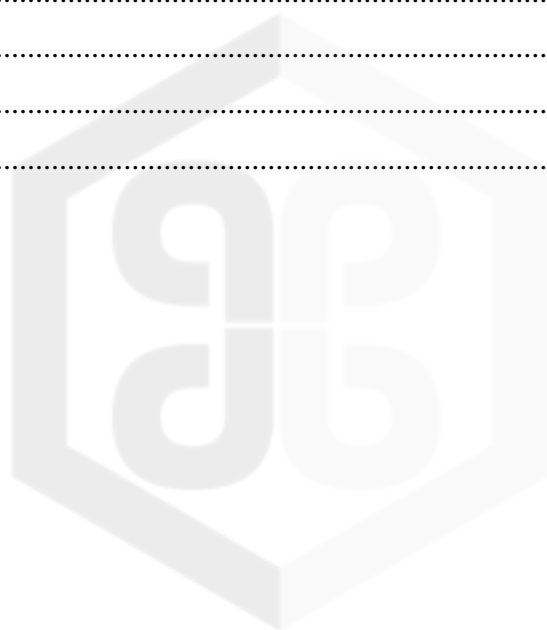
*The results show that the the Urban Village Deliberation Council (LMK) of Bintaro Village plays a role in increasing citizen involvement, but this role has not been optimal and the level of citizen involvement in Bintaro Village is at the second stage, which is tokenism. Therefore, to optimize its role, this study recommends that the the Urban Village Deliberation Council (LMK) of Bintaro Village increase its creativity in organizing activities, enhance citizen capacity, and utilize social media extensively to expand its reach in socializing activities and inviting the community to participate in the organized events. In this way, citizen involvement levels can continue to increase in the future.*

**Keywords** : *Urban Village Deliberation Council (LMK); Role; Citizen; Involvement.*

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| LEMBAR JUDUL LUAR .....                            | i    |
| LEMBAR JUDUL DALAM.....                            | ii   |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....                            | iii  |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                            | iv   |
| LEMBAR PERNYATAAN .....                            | v    |
| KATA PENGANTAR .....                               | vi   |
| ABSTRAK .....                                      | viii |
| <i>ABSTRACT</i> .....                              | ix   |
| DAFTAR ISI.....                                    | x    |
| DAFTAR TABEL.....                                  | xii  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                            | 1    |
| A. Latar Belakang Permasalahan .....               | 1    |
| B. Rumusan Permasalahan .....                      | 7    |
| C. Tujuan Penelitian .....                         | 8    |
| D. Manfaat Penelitian.....                         | 8    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                       | 9    |
| A. Tinjauan Kebijakan dan Teori .....              | 9    |
| 1. Tinjauan Kebijakan.....                         | 9    |
| 2. Tinjauan Teori .....                            | 10   |
| B. Konsep Kunci .....                              | 24   |
| C. Kerangka Berpikir .....                         | 25   |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                     | 26   |
| A. Metode Penelitian .....                         | 26   |
| B. Teknik Pengumpulan Data .....                   | 30   |
| C. Instrumen Penelitian .....                      | 34   |
| D. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data ..... | 36   |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN SINTESIS MASALAH .....       | 40   |

|  |    |
|--|----|
| A. Penyajian Data.....                             | 40 |
| B. Pembahasan dan Sintesis Pemecahan Masalah ..... | 55 |
| 1. Forum Partisipasi Masyarakat .....              | 55 |
| 2. Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi ..... | 63 |
| 3. Akses Masyarakat Dalam Partisipasi .....        | 69 |
| (1) Informasi .....                                | 75 |
| (2) Konsultasi.....                                | 75 |
| (3) Penentraman .....                              | 76 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....                    | 79 |
| A. Kesimpulan.....                                 | 79 |
| B. Saran .....                                     | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                               |    |
| LAMPIRAN.....                                      |    |



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 2.1 Tangga Partisipasi Menurut Arnstein (1969).....   | 18 |
| Tabel 2.2 Kerangka Berpikir.....  | 25 |
| Tabel 3.1 Jumlah RT, RW, dan LMK.....   | 28 |
| Tabel 3.2 <i>Keyinformant</i> .....   | 33 |
| Tabel 4.1 Jumlah RT, RW Kelurahan Bintaro.....  | 42 |
| Tabel 4.2 Data Pegawai Kelurahan Bintaro.....   | 44 |
| Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin<br>Kelurahan Bintaro Tahun 2024.....  | 47 |
| Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kelurahan Bintaro Tahun<br>2024.....                        | 48 |
| Tabel 4.5 Data Anggota LMK Kelurahan Bintaro Berdasarkan Pendidikan dan<br>Pekerjaan.....                   | 49 |
| Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan (Usia 7 Tahun Keatas)<br>Kelurahan Bintaro Tahun 2024..... | 50 |
| Tabel 4.7 Anggota LMK.....  | 52 |
| Tabel 4.8 Unsur Pelaksana LMK Kelurahan Bintaro.....  | 53 |

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1.1 Realisasi Investasi Triwulan II 2024.....                      | 1  |
| Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta.....                      | 2  |
| Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif menurut Miles, Huberman (1992) ..... | 37 |
| Gambar 4.1 Peta Wilayah Kelurahan Bintaro.....                            | 41 |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kelurahan Bintaro Tahun 2024.....          | 44 |



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## BAB I

### PERMASALAHAN PENELITIAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki otonomi khusus. Perubahan status Daerah khusus Ibukota (DKI) menjadi Daerah Khusus (DK) tidak serta melepas identitas Jakarta sebagai pusat ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat Jakarta menjadi daerah yang memiliki kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal investasi, Jakarta merupakan daerah yang menjadi salah satu lokasi investasi terbesar di Indonesia. Dilansir dari Kementerian Investasi, investasi yang masuk Jakarta pada triwulan II 2024 terkait Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp34,1 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMDA) sebesar 1,8 Miliar.



Gambar 1.1 Realisasi Investasi Triwulan II 2024

Sumber : *Kementerian Investasi/BKPM*

Posisi wilayah yang strategis dan menjadi pusat ekonomi nasional menjadi keuntungan yang dimiliki Daerah Khusus (DK) Jakarta. Keuntungan tersebut juga berdampak pada pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Daerah

Khusus Jakarta dalam menyikapi fenomena tersebut. Perbedaan geografis dan status sosial di setiap wilayah juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang tepat dan terbaik bagi masyarakatnya.

| Kab/Kota        | Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa) |            |
|-----------------|---|------------|
|                 | 2022  | 2023       |
| Kep Seribu      | 28.262  | 28.523     |
| Jakarta Selatan | 2.234.262   | 2.235.606  |
| Jakarta Timur   | 3.066.074   | 3.079.618  |
| Jakarta Pusat   | 1.053.482   | 1.049.314  |
| Jakarta Barat   | 2.458.707   | 2.470.054  |
| Jakarta Utara   | 1.799.220   | 1.808.985  |
| DKI Jakarta     | 10.640.007  | 10.672.100 |

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta*

Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini harus mampu bersinergi bersama masyarakat untuk bekerjasama untuk tercapainya pembangunan yang optimal. Disisi lain juga adanya keterbatasan pemerintah dalam menggapai seluruh lapisan masyarakat, sehingga pemerintah dalam hal ini harus dapat berkolaborasi dan merepresentasikan aspirasi masyarakat dengan memaksimalkan atas sumber daya manusia yang ada dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan baik dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian.

Partisipasi masyarakat diharapkan untuk bisa merepresentasikan apa saja yang dibutuhkan masyarakat atau kepentingan umum. Keterlibatan masyarakat juga membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk menyikapi persoalan yang terjadi dimasyarakat. Sinergitas pemerintah dengan masyarakat melalui metode *bottom-up* dapat memaksimalkan aspirasi yang disampaikan masyarakat untuk dijadikan pertimbangan dalam keberhasilan sebuah Pembangunan.

LMK di Kelurahan Bintaro, yang memiliki jumlah RT dan RW terbanyak dibandingkan wilayah lainnya di Kecamatan Pesanggrahan, memiliki potensi besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan partisipasi antara masyarakat yang di wilayah perkomplekan dan wilayah biasa. Selain itu munculnya anggapan bahwa aspirasi yang disampaikan melalui LMK kurang mendapatkan respon yang memadai, membuat masyarakat merasa percuma untuk berpartisipasi

Kelurahan Bintaro, dengan kompleksitas wilayahnya yang tinggi, seharusnya menjadi contoh dalam hal partisipasi masyarakat. Sayangnya, fenomena partisipasi yang timpang di salah satu wilayah menjadi permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Adanya persepsi bahwa partisipasi tidak memberikan dampak nyata, serta perbedaan tingkat partisipasi antara wilayah perkomplekan dan wilayah biasa, menjadi tantangan tersendiri bagi LMK dalam meningkatkan peran masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan Pembangunan di tingkat kelurahan . Namun, di Kelurahan Bintaro, partisipasi masyarakat masih belum optimal. Meskipun LMK berperan sebagai wadah untuk menampung aspirasi, masih banyak masyarakat yang merasa bahwa partisipasi mereka tidak memberikan kontribusi yang berarti. Padahal, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan sesuai kebutuhan Bersama.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan BIntaro tidak dapat dipungkiri. Namun rendahnya partisipasi masyarakat, dikalangan tertentu, menjadi kendala utama. Padahal, partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan hak untuk ikut serta dalam menentukan arah Pembangunan di lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran LMK dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat.



Selain keterlibatan masyarakat, diperlukan juga strategi yang tepat agar pembangunan dapat lebih efisien baik dari segi pembiayaan ataupun dari segi hasil. Pemilihan strategi ini bisa dikatakan penting karena hal tersebut menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua belah pihak antara pemerintah dengan masyarakat dapat mampu berperan secara optimal dan sinergis dalam pembangunan.

Paradigma pembangunan yang baru merubah deskripsi dari peran pemerintah itu dimana hal ini pemerintah menjadi fasilitator bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan. Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk terlibat dan memberikan pendapat dalam setiap proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dalam pemenuhan hak-haknya, pemerintah menyediakan fasilitas kepada masyarakat melalui kegiatan forum diskusi seperti musrenbang atau yang lainnya dalam menampung segala informasi dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat untuk dijadikan pertimbangan pembangunan.

Mengingat adanya keterbatasan pemerintah dalam hal menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus (DK) Jakarta merespon hal tersebut dengan membentuk media sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat yang dikenal Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Dewan Kelurahan.

Eksistensi dari Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) bukanlah lembaga yang baru di lingkungan masyarakat. Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) merupakan lembaga yang berasal dari Dewan Kelurahan (DEKEL). Dalam perjalanannya, Dewan Kelurahan (DEKEL) mengalami perubahan nomenklatur menjadi Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK). Perubahan nomenklatur tersebut menjadi langkah konkrit yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan sekaligus memperbaiki pelayanan publik mengingat sebelum perubahan nomenklatur, pelaksanaan fungsi dan tujuannya tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Dasar hukum atas perubahan tersebut tertuang

dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) atas perubahan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Dewan Kelurahan (DEKEL).

Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) atau yang dahulu dikenal Dewan Kelurahan (DEKEL) merupakan lembaga musyawarah yang berada di tingkat kelurahan dengan tujuan untuk membantu kerja lurah dalam hal menampung aspirasi masyarakat terkait partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tugas Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dijelaskan dalam Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 11 (Sebelas) antara lain :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke lurah;
- b. Memberikan masukan dalam rangka meningkatkan partisipasi;
- c. Menggali potensi untuk menggerakkan dan mendorong peran serta masyarakat;
- d. Menggali potensi untuk menggerakkan dan mendorong peran serta masyarakat;
- e. Ikut serta dalam menyelesaikan masalah kelurahan;
- f. Membuat rencana kerja tahunan; dan
- g. Menyusun tata tertib LMK berdasarkan tugas dan fungsi dari Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) secara tegas bahwa Lembaga.

Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas aspirasi dari masyarakat untuk diteruskan ke jenjang yang lebih tinggi lagi sekaligus berperan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu, *output* yang dihasilkan akan berdampak pada kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan observasi awal, masyarakat menganggap bahwa Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) masih dapat dikatakan kurang maksimal dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat karena masyarakat yang terlibat hanya itu-itu saja dan yang berpartisipasi sudah bisa ditebak siapa saja. Disisi lain Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) harus bisa beradaptasi terhadap masyarakat yang sifatnya heterogen melalui beberapa pendekatan yang berbeda. Hal tersebut juga memungkinkan terjadi karena pemahaman masyarakat yang keliru terkait proses pengambilan keputusan baik itu aspirasi yang disampaikan sudah pasti direalisasikan ataupun hal lainnya, padahal setiap aspirasi ada pertimbangan tersendiri pada setiap prosesnya dengan memperhatikan seberapa penting aspirasi tersebut untuk direalisasikan.

Buruknya persepsi dari masyarakat kepada penyelenggaraan pemerintah yang berkembang dimasyarakat juga mempengaruhi keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. Pada awal observasi yang dilakukan, adanya anggapan dari beberapa masyarakat menilai apapun forum yang dilakukan hanya sebagai formalitas semata dalam mengugurkan tugasnya karena sebelum adanya forum tersebut sudah ada aspirasi yang akan disampaikan diluar dari aspirasi yang disampaikan dan yang pihak yang terlibat hanya itu-itu saja, kemudian juga pihak-pihak yang mengkoordinir masyarakat terkesan acuh terhadap informasi yang memang seharusnya diterima oleh masyarakat mengenai akses yang berikan pemerintah kepada masyarakat untuk menyampaikan atau mengutarakan aspirasinya, padahal dalam konsep pembangunan yang berkembang sekarang partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting dalam mensukseskan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Fenomena tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) sekaligus dapat dijadikan tolak ukur sejauh mana peran Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kelurahan Bintaro dalam menggunakan kewenangannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Disisi lain juga terdapat tantangan pemerintah daerah setempat dalam menggapai aspirasi atas perbedaan lingkungan di wilayah Kelurahan Bintaro. Berdasarkan pembagian wilayahnya, Kelurahan Bintaro memiliki dua bagian

yang dikelola oleh dua pihak yang berbeda yaitu wilayah yang dikelola oleh pihak swasta (JAYA) dan wilayah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (PEMDA). Perbedaan wilayah tersebut memberikan kesenjangan infrastruktur ataupun tingkat Pendidikan antara wilayah yang dikelola swasta dan Pemerintah Daerah (PEMDA). Kesenjangan tersebut menimbulkan adanya perbedaan kebutuhan dan pemahaman masyarakat di masing-masing lingkungannya. Dalam hal ini pemerintah juga dituntut untuk bisa menganalisis mengenai Langkah atau keputusan apa yang harus diambil dalam rangka memberikan kebermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakatnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan. Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) mempunyai tugas dalam membantu mengatasi permasalahan yang berkembang ataupun melekat di masyarakat terkait partisipasi. Kehadiran Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) diharapkan dapat memberikan pengetahuan sekaligus pemahaman kepada masyarakat dan juga menjadi penengah masyarakat dalam menyikapi aspirasi yang disampaikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam prosesnya juga diharapkan masyarakat dapat memahami bagaimana proses atau mekanisme sebuah partisipasi, tahap apa saja yang harus dihadapi dan pengetahuan hak dan kewajiban masyarakat dalam bernegara. Dengan upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi pemerintah terkait kepercayaan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan yang secara tidak langsung dapat membantu pemerintah dalam kegiatan yang diselenggarakan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada mengingat banyaknya keterbatasan antara pemerintah menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Adanya rumusan masalah ini sebagai arah dalam penelitian dan pembahasan nantinya agar menghindari terjadi pelebaran permasalahan pada penelitian ini.

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Peran Lembaga Musyawarah Lembaga Kelurahan (LMK) di Kelurahan Bintaro”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini secara umum adalah mengetahui peran dari Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dalam meningkatkan partisipasi publik di Kelurahan Bintaro.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat terhadap Dunia Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menambah wawasan dan pengembangan teori partisipasi masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa/kelurahan.

#### **2. Manfaat terhadap Dunia Praktik**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah daerah dengan memberikan rekomendasi kebijakan atau alternatif solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Bagi Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) diharapkan dapat memberikan masukan dalam meningkatkan efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan, selain itu penelitian juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya berpartisipasi dalam pembangan dan memberikan memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara berpartisipasi.